



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
UNIT KERJA : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : GABRIEL PAKAENONI
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 652453

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 166.990.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/64 m2 di KAB / KOTA KUPANG, HASIL SENDIRI Rp. 51.890.000
2. Tanah Seluas 5470 m2 di KAB / KOTA KUPANG, HASIL SENDIRI Rp. 75.710.000
3. Tanah Seluas 1419 m2 di KAB / KOTA KUPANG, HASIL SENDIRI Rp. 39.390.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 114.500.000

1. MOBIL, AVANZA MINIBUS Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 14.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 22.025.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 395.717.011

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 699.232.011

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 699.232.011

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
UNIT KERJA : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : VEROLIENE ETLISYE FOENAY
2. Jabatan : SEKRETARIS
3. NHK : 489989

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	56.400.000
1. Tanah Seluas 705 m2 di KAB / KOTA KOTA KUPANG , LAINNYA		
	Rp.	56.400.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	90.000.000
1. MOBIL, SUZUKI S-CROSS Tahun 2017, LAINNYA	Rp.	90.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	59.550.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	459.999.958
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	393.417.164
F. HARTA LAINNYA	Rp.	100.000.000
Sub Total	Rp.	1.159.367.122

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.159.367.122

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

UNIT KERJA : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MARCELINA KOPONG**
2. Jabatan : **KEPALA BIDANG**
3. NHK : **900143**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 900.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 265 m2/111 m2 di KAB / KOTA KOTA KUPANG , HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000
2. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA KOTA KUPANG , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 26.000.000

1. MOTOR, YAMAHA 1KP A/T (SOUL GT) Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
2. MOTOR, HONDA E1F02N12M2 A/T Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 16.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 96.531.458

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.038.531.458

III. HUTANG Rp. 335.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 703.531.458

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
UNIT KERJA : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HERLYN SILVY MANAFE
2. Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
3. NHK : 800218

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 309.253.097

1. Tanah dan Bangunan Seluas 371 m2/110 m2 di KAB / KOTA KOTA KUPANG , HIBAH TANPA AKTA Rp. 90.153.000
2. Tanah Seluas 1475 m2 di KAB / KOTA KOTA KUPANG , HIBAH TANPA AKTA Rp. 188.800.000
3. Tanah Seluas 795 m2 di KAB / KOTA KOTA KUPANG , HIBAH TANPA AKTA Rp. 30.300.097

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 141.420.000

1. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
2. MOTOR, HONDA SCOOPY SOLO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000
3. MOBIL, TOYOTA AVANZA Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
4. MOTOR, YAMAHA SE 88 /SOLO Tahun 2023, HADIAH Rp. 9.420.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 62.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 24.225.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 537.398.097

III. HUTANG Rp. 244.358.396

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 293.039.701



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Februari 2023/Khusus - Calon PN)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
UNIT KERJA : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DOMINGOS DE CARVALHO
2. Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
3. NHK : 933804

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 200.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 547 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA KUPANG , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 60.000.000

1. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 1997, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 6.150.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 266.150.000

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 266.150.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.



3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.